



---

## Tantangan dan Peluang Pemerintahan Dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Teknologi

Apri Yondra

Universitas Terbuka, Indonesia  
Email: apriyondra@gmail.com

---

### ABSTRAK

Perubahan sosial dan teknologi telah menjadi faktor utama yang membentuk konteks pemerintahan di era kontemporer. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintahan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Melalui analisis literatur dan data terkini, pembahasannya berasal dari study literature melalui beberapa sumber buku, artikel ilmiah, jurnal yang relevan. Tantangan pemerintah terhadap peningkatan tuntutan masyarakat terhadap layanan. Beberapa peluang yang tersedia bagi pemerintahan dalam menghadapi perubahan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, perubahan sosial membuka jalan bagi inovasi dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pemerintahan juga dibahas dalam konteks mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul.

Kata kunci: Ilmu Pemerintahan, Perubahan, Sosial dan Teknologi, Tantangan dan Peluang

### PENDAHULUAN

Perubahan sosial dan teknologi telah menjadi pendorong utama dalam mengubah lanskap politik dan pemerintahan di era kontemporer. Dinamika ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi ilmu pemerintahan, sekaligus membuka peluang baru untuk inovasi dan kemajuan. Pemerintahan memiliki peran sentral dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang terjadi di masyarakat (Lauren, 2023). Perubahan sosial dan teknologi dapat membawa tantangan yang signifikan bagi pemerintahan, seperti perubahan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial. Dalam menghadapi ini, pemerintahan harus mampu beradaptasi dan berinovasi untuk tetap efektif dalam menjalankan tugasnya.

Perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan mengelola urusan public (Resen & Sushanti, 2022). Pertumbuhan populasi perkotaan, pergeseran demografi, dan integrasi ekonomi global telah menghasilkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap layanan publik, serta menimbulkan tantangan baru dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah sosial. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan kemungkinan baru dalam administrasi pemerintahan, partisipasi publik, dan penyediaan layanan yang lebih efektif dan efisien (Prisanda & Febrina, 2021).

Namun, sementara terdapat potensi besar dalam perubahan ini, ilmu pemerintahan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Kompleksitas masalah publik yang semakin meningkat, kurangnya daya tanggap dari struktur pemerintahan yang konvensional, dan tantangan etis dan keamanan terkait dengan penggunaan teknologi menjadi beberapa masalah yang perlu diatasi (Sepriano dkk., 2023). Oleh karena itu, penting

bagi ilmu pemerintahan untuk mengidentifikasi tantangan ini dengan tepat dan mengembangkan strategi yang relevan dalam menghadapinya.

Pada saat yang sama, perubahan sosial dan teknologi juga membuka peluang baru bagi ilmu pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintah, serta membuka ruang bagi inovasi dalam penyediaan layanan public (Nurdin, 2018). Penelitian yang lebih luas dan beragam juga dapat dilakukan untuk memahami dampak perubahan sosial dan teknologi terhadap sistem politik dan pemerintahan. Pengembangan teknologi memberi kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi kreatif untuk isu-isu sosial, yang bisa memperkuat lembaga dan proses pemerintahan (Galego dkk., 2022).

Kemajuan pesat dalam teknologi dan perubahan sosial yang diakibatkannya telah menghadirkan tantangan dan peluang bagi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi-transformatasi ini, yang didorong oleh revolusi digital, telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek pemberian layanan publik, perumusan kebijakan, dan tata kelola secara keseluruhan. Pemerintah di seluruh dunia sedang bergulat dengan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan dinamis ini, memanfaatkan potensi teknologi digital sekaligus mengatasi kompleksitas dan risiko yang ditimbulkannya.

Revolusi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan blockchain tidak hanya memberikan peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal regulasi, keamanan data, dan pengelolaan ekonomi (Lukman & Sakir, 2024). Dengan itu pemerintah harus mampu beradaptasi dan berinovasi untuk tetap efektif dalam menjalankan tugasnya. Pemerintahan harus memiliki visi yang jelas dan strategi yang tepat untuk menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Dengan demikian, pemerintahan dapat menghadapi perubahan dengan efektif dan mengantisipasi tantangan yang akan muncul.

Dengan maraknya media sosial dan platform online lainnya, masyarakat kini dapat dengan mudah terhubung dan berinteraksi dengan orang lain tanpa memandang hambatan geografis (Heryanto, 2018). Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran dinamika sosial, karena individu kini mampu membentuk dan memelihara hubungan dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Selain itu, lingkungan online juga memfasilitasi penyebaran informasi dan ide dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini mempunyai dampak positif dan negative (Oktarina & Abdullah, 2017). Di satu sisi, hal ini memungkinkan akses yang lebih besar terhadap beragam perspektif dan pertukaran pengetahuan.

Di sisi lain, hal ini juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang salah dan penguatan ideologi yang merugikan. Integrasi teknologi di berbagai industri telah membawa perubahan signifikan dalam perekonomian (Fonna, 2019). Peran pekerjaan tradisional digantikan oleh otomatisasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai pengangguran dan ketidakamanan kerja. Selain itu, meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan data. Secara keseluruhan, kemajuan pesat dalam teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam masyarakat, mempengaruhi komunikasi, dinamika sosial, penyebaran informasi, perekonomian, dan privasi.

Dalam konteks ini, kajian ini akan menjelajahi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh ilmu pemerintahan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Yang bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh ilmu pemerintahan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, diharapkan ilmu pemerintahan dapat menghasilkan gagasan dan strategi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam

## METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang relevan dengan topik penelitian (Abdillah dkk., 2021). Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Peneliti menggunakan metode ini untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan kajian yang sedang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perubahan Sosial dan Teknologi

Perubahan sosial adalah proses yang terus-menerus dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia (Goa, 2017). Sejak WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik pada 12 Maret 2020 lalu, sampai saat ini dunia masih menghadapi dampaknya dalam

berbagai sektor kehidupan. Dampak dalam bidang pendidikan terlihat jelas pada proses kegiatan belajar-mengajar yang berubah secara massif. Proses pendidikan yang semula dilakukan secara konvensional di lingkungan sekolah berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan.

Perubahan sosial sering kali diinduksi oleh kejadian atau situasi yang memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan cara hidup yang baru. Salah satu protokol kesehatan yang diumumkan oleh pemerintah adalah menjaga jarak atau yang dikenal dengan istilah social distancing. Dengan social distancing, masyarakat diharapkan untuk menjaga jarak fisik satu sama lain guna mengurangi penyebaran virus. Kondisi ini juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, dimana banyak perusahaan menerapkan kerja dari rumah atau work from home (Fitria, 2020). Hal ini mempengaruhi rutinitas kerja dan interaksi sosial antar karyawan. Selain itu, perubahan sosial dapat terjadi dalam bidang pendidikan. Salah satu dampaknya adalah perubahan dalam metode pembelajaran. Sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, banyak institusi pendidikan memutuskan untuk menerapkan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Keputusan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan siswa serta menghindari penyebaran virus di lingkungan sekolah.

Pendidikan daring memberikan tantangan baru bagi siswa, guru, dan orang tua dalam hal teknologi, aksesibilitas, dan interaksi personal. Namun, upaya pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial ini juga harus tepat dan responsif. Misalnya, pemerintah dan lembaga pendidikan harus memastikan akses yang adil dan merata terhadap teknologi dan jaringan internet bagi semua siswa untuk menjalani pembelajaran daring. Selain itu, perubahan sosial dalam pendidikan juga membutuhkan inovasi pembelajaran yang kreatif dan efektif agar siswa tetap dapat mendapatkan hasil belajar yang optimal. Perubahan sosial dalam pendidikan juga memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk guru, orang tua dan masyarakat secara umum.

Perubahan sosial juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti teknologi, ekonomi, dan politik, yang mengacu pada transformasi struktur masyarakat, institusi, dan norma seiring berjalannya waktu (Surya & Taibe, 2022). Transformasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain teknologi, kondisi ekonomi, dan pergeseran politik. Kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial. Misalnya, penemuan internet dan media sosial telah merevolusi komunikasi dan penyebaran informasi, yang menyebabkan perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi dan mengakses pengetahuan.

Faktor ekonomi juga berkontribusi terhadap perubahan sosial. Misalnya, perubahan sistem ekonomi, seperti industrialisasi atau globalisasi, dapat menyebabkan pergeseran pola

lapangan kerja dan distribusi pendapatan, yang pada gilirannya berdampak pada dinamika sosial dan hubungan dalam suatu komunitas. Faktor politik juga memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial. Perubahan kebijakan, ideologi, dan struktur kekuasaan pemerintah dapat menyebabkan pergeseran norma, nilai, dan institusi sosial. Misalnya, gerakan politik yang mendukung hak-hak sipil atau kesetaraan gender telah membawa perubahan sosial yang signifikan di banyak masyarakat.

Secara keseluruhan, perubahan sosial merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor lain yang dapat berkontribusi terhadap perubahan sosial meliputi pergeseran budaya, perubahan demografi, dan tantangan lingkungan. Faktor-faktor ini berinteraksi satu sama lain, menciptakan lanskap sosial yang dinamis dan terus berkembang. Dalam sintesis, perubahan sosial mempengaruhi struktur dan fungsi masyarakat, serta memerlukan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi (Suryono, 2019).

Teknologi adalah sarana yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi (Syamsuar & Reflianto, 2019). Di dunia yang berubah dengan cepat saat ini, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial. Melalui penggunaan teknologi, kita dapat mengakses informasi dan pengetahuan dengan cepat, berkomunikasi dengan orang lain melalui jarak jauh, dan mempelajari keterampilan dan konsep baru. Hal ini memungkinkan kami untuk tetap mendapatkan informasi terkini dan relevan dalam masyarakat yang terus berkembang.

Berbagai alat dan aplikasi teknologi dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kita. Misalnya, platform pembelajaran online memberikan peluang untuk pendidikan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan. Selain itu, teknologi memungkinkan kita berkolaborasi dengan orang lain melalui platform virtual, menghilangkan hambatan geografis dan membina hubungan global. Selain itu, teknologi membantu penyebaran informasi secara efisien, memungkinkan kita untuk tetap mendapat informasi tentang perubahan masyarakat dan beradaptasi. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan menemukan solusi inovatif terhadap tantangan sosial.

Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah. Di dunia yang berubah dengan cepat saat ini, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial. Melalui pemanfaatan teknologi, kita dapat mengakses informasi dan pengetahuan dengan cepat, berkomunikasi dengan orang lain melalui jarak jauh, serta mempelajari keterampilan dan konsep baru (Hikmat, 2022).

Hal ini memungkinkan kami untuk tetap mendapatkan informasi terkini dan relevan dalam masyarakat yang terus berkembang. Perkembangan Teknologi Informasi saat ini begitu pesat, segala kebutuhan sehari-hari hanya dapat dilakukan dengan perangkat pintar dan koneksi internet. Segala hal bisa dilakukan mulai dari mencari informasi, mengakses media sosial, belajar online, hingga kebutuhan perekonomian dan lain sebagainya.

## **2. Tantangan Pemerintahan dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Teknologi**

Ilmu pemerintahan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan dan administrasi negara. Ilmu pemerintahan harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan

teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi (Yasa dkk., 2021). Ilmu Pemerintahan adalah bidang akademik yang mempelajari aspek-aspek teoretis dan praktis dari pemerintahan dan politik. Konsep ini mencakup analisis struktur, proses, dan mekanisme pemerintahan pada berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga internasional. Ilmu Pemerintahan juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Peningkatan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik adalah suatu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan organisasi publik. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik kian meningkat, sehingga diperlukan terobosan dan inovasi untuk menjawabnya. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, obyektif, efisien, dan profesional. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada publik atau pengguna jasa adalah salah satu upaya atas tuntutan masyarakat tersebut (Ulum, 2018).

Tuntutan masyarakat yang meningkat dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas layanan  
Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat dalam memberikan jasa public.
- b. Transparansi  
Masyarakat menuntut transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik, termasuk proses pengaduan dan penanganan masalah.
- c. Responsivitas  
Masyarakat menuntut pelayanan yang responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat, serta penanganan pengaduan yang efektif dan efisien.
- d. Keterbukaan  
Masyarakat menuntut keterbukaan dalam pengelolaan pelayanan publik, termasuk akses yang mudah untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan informasi tentang pelayanan.
- e. Kualitas tata kelola  
Masyarakat menuntut tata kelola yang baik dan bersih dalam pengelolaan pelayanan publik, serta penanganan pengaduan yang akuntabel dan transparan.
- f. Peningkatan kepercayaan  
Masyarakat menuntut peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah dan aparatur pemerintah, serta peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan.
- g. Peningkatan kemampuan  
Masyarakat menuntut peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat.
- h. Peningkatan partisipasi  
Masyarakat menuntut peningkatan partisipasi dalam pengelolaan pelayanan publik, termasuk pengaduan dan penanganan masalah.
- i. Peningkatan kualitas informasi  
Masyarakat menuntut peningkatan kualitas informasi yang diberikan oleh pemerintah, termasuk informasi tentang pelayanan dan proses pengaduan.
- j. Peningkatan kualitas pelayanan  
Masyarakat menuntut peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat (*Tuntutan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kian Meningkat* | Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban, t.t. 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan nyata dalam tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public (AMA, 2015). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, peningkatan kesadaran dan pendidikan di kalangan masyarakat, serta meningkatnya penekanan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Akibatnya, masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai warga negara dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari pemerintah. Selain itu, pandemi COVID-19 semakin menyoroti pentingnya pelayanan publik yang efisien dan efektif. Selama pandemi, masyarakat sangat bergantung pada lembaga dan institusi pemerintah untuk mendapatkan layanan penting seperti layanan kesehatan, bantuan sosial, dan penyebaran informasi. Pemerintah memainkan peran penting dalam memenuhi tuntutan yang semakin meningkat ini. Namun, meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik telah diterapkan, masih terdapat kendala yang menghambat daya tanggap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan beberapa langkah. Langkah-langkah ini dapat mencakup peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai negeri melalui program pelatihan dan pengembangan, penerapan teknologi digital untuk menyederhanakan proses pemberian layanan, mendorong transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga pemerintah, dan memastikan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipatif.

Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan masyarakat, terdapat kebutuhan yang semakin besar akan kebijakan yang responsif dan inovatif. Kebijakan-kebijakan tersebut harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang muncul, serta menumbuhkan budaya inovasi. Kebijakan harus tangkas dan fleksibel, mampu mengimbangi laju perubahan teknologi dan mengantisipasi potensi konsekuensinya. Hal ini dapat dicapai dengan terus mengevaluasi dan memperbarui kebijakan, melibatkan pemangku kepentingan dan pakar dari berbagai sektor, dan mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan melakukan hal ini, kebijakan dapat secara efektif mengatasi permasalahan yang muncul seperti transformasi digital, keamanan siber, perlindungan data, dan hak konsumen dalam ekonomi digital.

Selain itu, kebijakan juga harus memprioritaskan pengembangan dan implementasi inovasi sektor public (Suriadi & Frinaldi, 2023). Hal ini dapat melibatkan penggunaan teknologi digital, reformasi pemerintahan yang terbuka, dan pendekatan proaktif dalam pemberian layanan publik. Kebijakan yang responsif dan inovatif ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan dunia usaha untuk berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Perbandingan kebijakan publik internasional di era digitalisasi dapat memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan untuk menciptakan strategi yang responsif dan inovatif. Kesimpulannya, kebutuhan akan kebijakan yang responsif dan inovatif sangatlah penting.

Pemerintah harus menyadari pentingnya beradaptasi dengan era digital baru dan mengembangkan kebijakan yang dapat secara efektif mengatasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Hal ini termasuk memberikan pedoman dan standar, mengalokasikan dana yang cukup, dan fokus pada bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur digital, keamanan siber, dan privasi data. Pemerintah harus mendorong dan mendukung inovasi di lembaganya dengan mendorong budaya eksperimen, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan solusi inovatif terhadap permasalahan yang kompleks.

Penting bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan kebijakan yang

komprehensif dan inklusif yang mempertimbangkan beragam perspektif dan kebutuhan. Dengan mengambil pendekatan inklusif dan kolaboratif, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan mereka responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warganya. Kesimpulannya, penerapan kebijakan yang responsif dan inovatif sangat penting dalam menghadapi tantangan dan peluang era digital.

Dalam menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang tersedia bagi ilmu pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi:

- a. Mengembangkan sistem e-government: Pemerintahan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendigitalisasi layanan publik, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
- b. Memanfaatkan big data dan analisis data: Dengan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintahan dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- c. Mengembangkan platform partisipasi publik: Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk memberikan kesempatan partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintahan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan akses publik yang lebih mudah terhadap informasi mengenai kegiatan pemerintahan, anggaran, dan kebijakan publik.
- e. Mendorong kolaborasi dan komunikasi antara lembaga pemerintah: Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Praditya, 2014).

Dengan memanfaatkan teknologi, ilmu pemerintahan dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan memperkuat partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ilmu pemerintahan juga dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengelola data yang fragmentaris, menciptakan identitas digital yang efektif, serta memastikan keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ilmu pemerintahan juga dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengelola data yang fragmentaris, menciptakan identitas digital yang efektif, serta memastikan keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Efisiensi proses administrasi sangat penting bagi efektivitas dan keberhasilan pemerintahan mana pun. Dengan menerapkan e-Government di Indonesia, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi administrasinya secara signifikan. E-Government, yang mengacu pada penggunaan teknologi dan sistem modern dalam operasional dan layanan pemerintahan, dapat menyederhanakan proses administrasi, mengurangi dokumen, dan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah. Dengan e-Government, tugas dan kewajiban dapat diproses lebih cepat, sehingga menghilangkan alasan lambatnya proses.

Selain itu, e-Government juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik. Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah dapat meningkatkan peran kontrol publik dan memastikan proses administrasi dilaksanakan secara efisien. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan layanan online, big data, media sosial, aplikasi seluler, dan komputasi awan, yang memperluas persepsi terhadap layanan e-Government. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan e-Government, pemerintah dapat

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab terhadap pelayanan public (Heriyanto, 2022).

Hal ini terjadi karena adanya pelayanan yang dapat diakses melalui internet, seperti pendaftaran online, pembayaran tagihan, dan pengajuan permohonan. Dampak positif lainnya adalah adanya sistem e-government yang memungkinkan transformasi layanan publik dengan meningkatkan kualitas, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perubahan sosial dan teknologi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dapat menggunakan platform media sosial dan aplikasi online untuk berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi publik, memberpendapat, mengajukan usulan, dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik yang sedang dibahas. Proses penganggaran partisipatif melalui platform media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, dan usulan terhadap isu-isu penganggaran pemerintah yang relevan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial dan teknologi telah memberikan dampak positif bagi aksesibilitas layanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

## KESIMPULAN

Perubahan sosial dan teknologi memberikan peluang untuk inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk peningkatan aksesibilitas dan efisiensi layanan melalui e-government dan platform digital. Perubahan sosial yang cepat dan kompleks dapat mengganggu stabilitas politik, tata kelola pemerintahan, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat tantangan dalam mengadaptasi pemerintahan yang ada untuk menerima dan mengintegrasikan inovasi teknologi serta proses digitalisasi. Teknologi yang berkembang pesat, dapat mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warganya, mengelola data, dan membuat keputusan.

Meskipun tantangan yang dihadapi besar, perubahan sosial dan teknologi juga membawa peluang baru bagi ilmu pemerintahan, seperti meningkatkan efisiensi layanan publik, partisipasi masyarakat, dan inovasi kebijakan. Menghadapi perubahan tersebut memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi untuk mengembangkan solusi yang efektif.

Ilmu pemerintahan perlu merespons dengan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat yang lebih luas dan implementasi teknologi dalam berbagai aspek pemerintahan. Dibutuhkan keterampilan teknis dan manajerial baru serta kapasitas untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dan layanan publik di tingkat lokal. Pembahasan juga mungkin termasuk pentingnya mengatasi kesenjangan akses dan kesenjangan digital serta mengembangkan kondisi kerja dan budaya yang mendukung inovasi di sektor publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A., Sufyati, H. S., Muniarty, P., Nanda, I., Retnandari, S. D., Wulandari, W., Prasetyo, A. H., Sinambela, S., Mansur, M., & Aulia, T. Z. (2021). *Metode penelitian dan analisis data comprehensive* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- AMA, M. H. P. (2015). *Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik (Studi deskriptif tentang strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor)* [PhD Thesis, Universitas Airlangga].
- Fitria, N. J. L. (2020). Penerapan work from home dan work from office dengan absensi online sebagai implikasi e-government di Masa New Normal. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 14(1 Juni), 69–83.

- Fonna, N. (2019). *Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang*. Guepedia. Galego, D., Moulart, F., Brans, M., & Santinha, G. (2022). Social innovation & governance: A scoping review. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*.
- Goa, L. (2017). Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 2(2), 53–67.
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 129–138.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik*. IRCiSoD.
- Hikmat, H. (2022). The readiness of education in indonesia in facing the society era 5.0. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2953–2961.
- Lauren, C. C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 874–884.
- Lukman, J. P., & Sakir, A. R. (2024). Transformasi Digital dalam Administrasi Publik: Peluang dan Tantangan. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(1), 1042–1049.
- Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 1–17.
- Oktarina, Y., & Abdullah, Y. (2017). *Komunikasi dalam perspektif teori dan praktik*. Deepublish.
- Praditya, D. (2014). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat pemerintahan desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2).
- Prisanda, E., & Febrina, R. (2021). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 155–171.
- Resen, P. T. K., & Sushanti, S. (2022). *Globalisasi: Dimensi dan Implikasinya*. Jejak Pustaka. Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah, S., Riwayati, A., & Indarti, C. F. S. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suriadi, H., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 17(2). <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/4276>
- Surya, I. B., & Taibe, P. (2022). *Transformasi Spasial dan Perubahan Sosial Komunitas Lokal: Perspektif Dinamika Pembangunan Kawasan Kota Baru*. Chakti Pustaka Indonesia.
- Suryono, A. (2019). *Teori dan strategi perubahan sosial*. Bumi Aksara.
- Syamsuar, S., & Reflianto, R. (2019). Pendidikan dan tantangan pembelajaran berbasis teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2). *Tuntutan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kian Meningkatkan | Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban*. (t.t.). Diambil 9 Mei 2024, dari
- Ulum, M. C. (2018). *Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2021). Penguatan reformasi birokrasi menuju era society 5.0 di indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42.